



Buletin

ISEN MULANG

edisi : 326 / Desember 2021

Buletin Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

DAFTAR ALUR PUBLIKASI KALIMANTAN

Rayu Desem



PERINGATI RANGKAIAN HARI
ANTIKORUPSI SEDUNIA, GUBERNUR
KALTENG HADIRI SEMNAS KPK RI
TENTANG PENGUATAN TRANSPARANSI
DAN AKUNTABILITAS PBJ

4



GUBERNUR SUGIANTO
SABRAN TINJAU
BENDUNG KARAU
DI BARITO TIMUR

17



**GUBERNUR SUGIANTO SABRAN
SERAHKAN DIPA DAN TKDD 2022
KEPADA BUPATI/WALI KOTA
DAN SATKER K/L DI KALTENG**

WAGUB HADIRI PUNCAK
PERINGATAN HARI IBU
TINGKAT PROVINSI KALTENG

18



**DITERBITKAN BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pelindung :

Gubernur Kalimantan Tengah

Penasehat :

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarah :

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekda Prov. Kalteng

Penanggung Jawab:

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemimpin Redaksi:

Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Wakil Sekretaris Redaksi:

Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Koordinator Distribusi :

Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Redaktur :

Setya Sri Saryanta, Noriko Yunanto

Penyedia Bahan :

Rani Diah Anggraini

Staf Redaksi :

Dewi Yulianti, Dina Meitriana,
Winda Paskanova, Renny Patrisia,
Nova Anggreni, Sophia Fitra Djangkhan.

Fotografer :

Boy Irawan, Efendy, Eka Supriyaningsih, Joko Prabowo.

Layout :

Benito Zuares

Operator Komputer :

Kamala Sri Yadikawati Rasan.

Alamat Redaksi :

Jl. RTA Milono No. 1 Palangka Raya

Telp/Fax (0536) 4200241

Ijin Penerbitan Khusus

No. 2114/SK/Dirjen PPG/STT/1995

DAFTAR ISI :

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN SERAHKAN DIPA DAN TKDD 2022 KEPADA BUPATI/WALI KOTA DAN SATKER K/L DI KALTENG	3
PERINGATI RANGKAIAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA, GUBERNUR KALTENG HADIRI SEMNAS KPK RI TENTANG PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PBJ	5
PEMPROV KALTENG SERAHKAN BANTUAN BAGI WARGA TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU	6
WAGUB HADIRI FORUM NASIONAL STUNTING 2021	7
PJ. SEKDA SAMBUT BAIK PROGRAM KAMPUNG BERKAH DI 14 KABUPATEN/KOTA	8
PJ. SEKDA KALTENG HADIRI PERINGATAN HAKORDIA KEMENKEU TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL	8
PJ. SEKDA KALTENG BUKA RAPAT KOORDINASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN BIDANG AIR MINUM	9
WAGUB BUKA SECARA RESMI RAKORDA FKUB KABUPATEN/KOTA SE-KALTENG TAHUN 2021	10
WAGUB EDY PRATOWO HADIRI PELANTIKAN PENGURUS MAJELIS WILAYAH KAHMI KALTENG PERIODE 2021-2026	11
PEMPROV GELAR KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN REVISI RTRW PROVINSI KALTENG 2015-2035	12
WAGUB KALTENG BUKA RAKORWIL TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH SEMESTER II TAHUN 2021	13
WAGUB IKUTI RAKOR KESIAPAN PENERAPAN PPKM NATARU BERSAMA MENDAGRI	14
WHO TETAPKAN VARIAN BARU B.1.1.529 MENJADI VARIAN YANG MENGKHAWATIRKAN	15
4 UPAYA PEMERINTAH CEGAH LONJAKAN COVID-19 JELANG NATARU	16
GUBERNUR SUGIANTO SABRAN TINJAU BENDUNGAN KARAU DI BARITO TIMUR	17
WAGUB HADIRI PUNCAK PERINGATAN HARI IBU TINGKAT PROVINSI KALTENG	18
FOTO-FOTO KEGIATAN PEMPROV. KALTENG	19

Redaksi menerima naskah tulisan dari Dinas, Badan, Instansi, Biro dan Kantor Unit Satuan Kerja baik berupa Artikel, Feature maupun Foto yang menunjang kemajuan Buletin Isen Mulang dan Redaksi berhak mengedit Naskah yang masuk. Kiriman Naskah Tulisan maupun Foto disampaikan ke Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Kalteng Jl. RTA Milono No.1 Palangka Raya, Telp/Fax (0536) 4200241

Website : <http://biroadpim.kalteng.go.id/>

Facebook : <http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>

Twitter : http://www.twitter.com/setda_kalteng

Instagram : [@sekretariat.daerah.kalteng](https://www.instagram.com/@sekretariat.daerah.kalteng)

email : buletin.isenmulang@gmail.com

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN SERAHKAN DIPA DAN TKDD 2022 KEPADA BUPATI/WALI KOTA DAN SATKER K/L DI KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2022 kepada Bupati/Wali Kota, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Satker K/L), dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi, bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Palangka Raya pada Rabu (1/12/2021).

Tampak pula hadir dalam acara penyerahan DIPA tersebut, antara lain Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Yudianto Putrajaya, Penjabat Sekretaris Daerah Nuryakin, dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) Kalteng Hari Utomo.

Kegiatan yang diselenggarakan dengan memperhatikan protokol kesehatan pada hari ini merupakan tindak lanjut cepat atas telah diserahkannya DIPA dan Daftar Alokasi TKDD 2022 Provinsi Kalteng oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Gubernur Sugianto Sabran pada tanggal 29 November 2021 secara virtual.

Dalam kesempatan ini, penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 diterima secara simbolis dari tempat duduk masing-masing oleh sejumlah Bupati/Wali Kota serta 19 perwakilan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalteng.

Saat memberikan arahan, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran meminta kepada Bupati/Wali Kota agar segera mendistribusikan DIPA kepada semua pengguna anggaran, sehingga pengelolaan belanja anggaran tahun 2022 bisa segera direalisasikan dengan cepat, tepat, responsif, dan efektif.

“Kepada Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah, saya minta seluruh dokumen DIPA Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah tahun 2022 tersebut agar segera diserahkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di masing-masing Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah,” pinta Gubernur Sugianto Sabran.

Gubernur pun berharap proses lelang bisa secepatnya dimulai agar kickoff dapat dilaksanakan pada minggu pertama Januari 2022, sehingga proyek pembangunan fisik, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, juga dapat segera berjalan pada awal tahun untuk mendorong pemulihan perekonomian akibat pandemi



COVID-19. “Supaya triwulan pertama, perekonomian kita membaik karena sudah ada belanja dari Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah,” ungkap Gubernur.

Gubernur Sugianto Sabran kemudian menegaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran tersebut harus terhindar dari berbagai tindak korupsi, sehingga benar-benar mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalteng. “Jadi, kita mengantisipasi, kerja sama dengan APH, APIP, supaya ada tindakan-tindakan

pencegahan (korupsi)," tegas Gubernur Kalteng.

Selanjutnya, Gubernur kembali mengingatkan agar tetap waspada terhadap ancaman COVID-19, dengan terus menggencarkan penegakan Protokol Kesehatan, vaksinasi, dan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). "Supaya kita bisa melakukan antisipasi dan langkah-langkah supaya tidak terjadinya nanti penularan COVID yang semakin cepat. Tentu langkah-langkah harus kita ambil secara masif dan terukur supaya COVID ini seperti sekarang (tetap) landai," pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kakanwil DJPBN Kalteng Hari Utomo dalam sambutannya juga menyampaikan harapan yang sama dengan Gubernur terkait percepatan realisasi DIPA dan TKDD 2022. "Kami mengharapkan kiranya DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKDD tahun 2022 dapat segera ditindaklanjuti agar kegiatan dapat dilaksanakan segera di awal tahun 2022, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Hari Utomo.

Adapun Alokasi TKDD tahun 2022 untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalteng, berjumlah sebesar Rp 15,987 triliun lebih, terdiri dari Dana Bagi Hasil Rp 1,940 triliun, Dana Alokasi Umum Rp 9,246 triliun, Dana Alokasi Khusus Fisik Rp 1,590 triliun, Dana Alokasi Khusus Non Fisik Rp 1,944 triliun, Dana Insentif



Daerah Rp 60,911 miliar, dan Dana Desa Rp 1,204 triliun. Kemudian, alokasi dana APBN melalui DIPA Kementerian/Lembaga sebesar Rp 6,93 triliun lebih.

Lebih lanjut, pada kesempatan tersebut, Gubernur Sugianto Sabran menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diserahkan oleh Kakanwil DJPBN Kalteng Hari Utomo atas prestasi Pemerintah Provinsi Kalteng yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama 5 tahun berturut-turut atau lebih. (set/bow).



PERINGATI RANGKAIAN HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA, GUBERNUR KALTENG HADIRI SEMNAS KPK RI TENTANG PENGUATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PBJ



BANJARMASIN – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran menghadiri Seminar Nasional (Semnas) Penguatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan digelar di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (2/12/2021).

Semnas ini merupakan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) tahun 2021 yang diperlakukan setiap tanggal 9 Desember dan mengangkat tema "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi". Semnas menghadirkan narasumber, antara lain Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan LKPP Emin Adhy Muhaemin, Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari, serta Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan. Sementara itu, hadir juga secara langsung, Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Adapun Gubernur DIY, Gubernur Jawa Tengah, dan Gubernur Jawa Timur yang kehadirannya di Banjarmasin diwakili, mengikuti Semnas secara virtual.

Sesuai arah kebijakan Presiden RI tentang Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas Pencegahan Korupsi. Tujuan Stranas sebagai kolaborasi antarlembaga dan instansi untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Stranas ini tentu saja merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus pada sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi. KPK melakukan pendampingan implementasi pencegahan tindak pidana korupsi pada seluruh Pemerintah Daerah melalui aplikasi Monitoring Center for Prevention (MCP)

dengan fokus pada 8 area, yaitu manajemen APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), optimalisasi pajak daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset daerah, serta tata kelola Dana Desa.

Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar dalam sambutannya menyebutkan ada berbagai titik rawan korupsi yang terjadi di Pemerintahan Daerah yang diharapkan dapat dihindari. Selain itu, Lili juga menampilkan modus korupsi pada tahapan proses PBJ yang rawan terjadi pada proses perencanaan anggaran, pelaksanaan PBJ pemerintah, dan proses pengawasannya.

Terciptanya Pokja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPB) yang baik tidak terlepas dari terlaksananya pembinaan dan pengawasan UKPB yang melekat. Hal ini bisa terjadi jika Pemerintah Provinsi, yaitu para Gubernur, melakukan pembinaan dan pengawasan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pembinaan/pengawasan Pemerintah Provinsi dalam aspek kelembagaan oleh Dirjen Otonomi Daerah. Sedangkan dalam aspek barang/jasa, dilaksanakan oleh Inspektor Jenderal dan LKPP dalam melakukan pembinaan teknis kepada para Gubernur.

"Pembangunan UKPB yang berintegritas dapat tercipta bila lembaga-lembaga tersebut berupaya dan memiliki kebijakan organisasi untuk mendukung tercapainya integritas personal. Selain itu, lembaga harus melakukan tindakan konsisten sesuai dengan nilai, tujuan, dan tugas yang diemban lembaga tersebut," pungkas Lili.

Semnas turut dihadiri secara virtual oleh para Inspektor seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan serta anggota Forkopimda Kalimantan Selatan dan disiarkan melalui kanal YouTube KPK RI. (dew/man).

PEMPROV KALTENG SERAHKAN BANTUAN BAGI WARGA TERDAMPAK ERUPSI GUNUNG SEMERU



SURABAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyerahkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Bantuan senilai Rp 7,5 miliar tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Edy Pratowo kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur, Jumat (10/12/2021).

Selanjutnya pada hari yang sama, Gubernur Jawa Timur menyerahkan bantuan tersebut kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq yang pada kesempatan kali ini juga hadir secara langsung di Gedung Negara Grahadi.

Membacakan sambutan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Wagub Edy Pratowo menyampaikan keprihatinan mendalam kepada warga Jawa Timur, khususnya warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru tahun 2021 ini yang disebut lebih besar dibanding erupsi tahun 2020 lalu.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh rakyat Kalimantan Tengah, saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya korban akibat letusan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur. Semoga amal ibadah seluruh korban diterima di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan," ucap Gubernur sebagaimana disampaikan Wagub Edy Pratowo.

Bantuan dari Pemprov Kalteng tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak dan mempercepat pemulihan pasca bencana. "Menjadi harapan kita bersama, hal ini dapat mempererat persaudaraan dan persahabatan yang telah terjalin, dengan harapan bisa membuat bangsa ini menjadi lebih maju yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai sebuah negara yang besar dan majemuk," imbuh Gubernur.

Dalam sambutan yang dibacakan Wagub Edy Pratowo, Gubernur tidak lupa juga mengucapkan terima

kasih kepada para relawan kemanusiaan yang telah menggalang kebersamaan untuk membantu korban dengan sekuat tenaga dan pikiran. "Semoga kebaikan saudara-saudara sekalian menjadi nilai ibadah. Mari kita berkolaborasi bersama-sama untuk membantu saudara kita yang terdampak erupsi Gunung Semeru," ajak Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas kepedulian Pemprov Kalteng terhadap warga terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. "Salam hangat kami, Pemerintah dan warga Jawa Timur, khususnya warga Kabupaten Lumajang, atas perhatian dan solidaritas saudara-saudara kami di Provinsi Kalimantan Tengah. Bantuan ini mempunyai nilai manfaat yang sangat besar dalam penanganan dampak erupsi," ujar Gubernur Khofifah.

Gubernur Jawa Timur tersebut memaparkan bahwa pendataan klaster dan infrastruktur terdampak masih dilakukan, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan jembatan, di mana Jembatan Gladak Perak yang menjadi penghubung Lumajang dan Malang diinformasikan terputus akibat awan panas Semeru.

Gubernur Khofifah pun menegaskan bahwa Pemerintah hadir dan bekerja keras untuk memberikan ketenangan kepada masyarakat. Kerja keras tersebut, dikatakannya, mendapatkan ruang dan dukungan yang luar biasa dari berbagai daerah, termasuk dari Pemprov Kalteng.

Tampak hadir mendampingi Wagub Kalteng Edy Pratowo, antara lain Ketua DPRD Provinsi Kalteng Wiyatno, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng Faridawaty Darland Atjeh, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Nuryakin, Kabinda Kalteng Brigjen TNI Sinyo, Irvanda Polda Kalteng Kombes Pol Iman Prijantoro, Ass Intel Kejaksaan Tinggi Kalteng Komaidi, Kasrem 102/Panju Panjung Brigjen TNI Wakhyono, Plt. Kepala Biro Umum Lisda Arriyana, dan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder. (ran/man/eka/pit/ foto: humas pemprov jatim).



WAGUB HADIRI FORUM NASIONAL STUNTING 2021

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo, didampingi Asisten Administrasi Umum Lies Fahimah, Kepala Bappedalitbang Kaspinor, serta Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Linae Victoria Aden, hadir mengikuti Forum Nasional Stunting 2021 secara virtual dari Ruang Rapat Wagub, Kompleks Kantor Gubernur, Selasa (14/12/2021). Kegiatan ini digelar oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI bekerja sama dengan Tanoto Foundation.

Stunting masih menjadi perhatian khusus Pemerintah Indonesia karena stunting bukanlah persoalan bangsa saat ini saja melainkan menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan ditandatanganinya Perpres Nomor 72 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Perpres ini menjadi landasan hukum penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, pemantauan, dan evaluasi yang diperlukan dalam berbagai upaya penurunan stunting. Target pemerintah adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 sehingga pada tahun 2030 sesuai dengan target SDG's angka prevalensi diharapkan sudah 0. Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin dalam arahan ketika membuka forum ini.

Wapres melanjutkan, saat ini prevalensi stunting di Indonesia masih tercatat 27%. "Ini artinya untuk mencapai target 14% pada tahun 2024, kita hanya punya waktu kurang dari 3 tahun lagi. Target yang cukup ambisius di sisa waktu singkat ini adalah tantangan besar yang harus dihadapi bersama," ungkap Wapres.

Untuk itu, Wapres menekankan kolaborasi kerja berbagai pihak untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat Desa/Kelurahan untuk menurunkan stunting. Selain itu, komitmen yang kuat untuk memastikan seluruh aktor pelaksana hadir dan mengerahkan upaya terbaiknya. "Masa depan tergantung pada aksi dan langkah kolaboratif yang kita lakukan. Kita harus optimis tapi tidak boleh lengah, anak bangsa bagian dari masa kini dan masa depan. Sekarang kita merawat mereka, kelak mereka yang merawat bangsa," pungkasnya.



Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan BKKBN berkomitmen untuk mencapai target 14% angka stunting di tahun 2024 meskipun saat ini masih berada di angka 27,7%. Hasto menyebutkan BKKBN sudah membuat terobosan atau inovasi untuk penurunan stunting, yaitu dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK). "Jadi, stunting itu dimulai dari keluarga, pendekatan melalui keluarga di mana tim pendamping keluarga itu ada 3 unsur, yaitu dari Kesehatan atau Bidan, Tim Penggerak PKK, dan kader-kader yang ada di daerah," jelasnya.

Hadir selaku pembicara dalam Forum Nasional Stunting 2021, antara lain Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Muhamdij Effendy, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Dalam Negeri diwakili Plt. Dirjen Bangda Sugeng Haryono, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, serta Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Made Arya Wijaya. (dew/dmr).



PJ. SEKDA SAMBUT BAIK PROGRAM KAMPUNG BERKAH DI 14 KABUPATEN/KOTA

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Nuryakin menghadiri acara Pencanangan Kampung Berkah yang berlangsung di Halaman Masjid Al – Muahjirin, Kampung Sidomulyo, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, Rabu (01/12/2021).

Dalam wawancara langsung, Danrem 102/Pjg Brigjen TNI Yudianto Putrajaya menyampaikan bahwa Korem 102/Pjg mendukung penuh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalteng. "Hari ini, Rabu, 21 Desember 2021, dilakukan pencanangan Kampung Berkah di 13 Kabupaten dan 1 Kota plus 1 Provinsi. Saya selaku Danrem 102/Panju Panjung, sebelumnya memang intens berkomunikasi dengan Bapak Gubernur untuk bisa mengembangkan Berkah, yaitu Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis," ungkap Danrem.

Ditambahkan bahwa Danrem 102/Pjg Yudianto Putrajaya telah memerintahkan jajarannya di Korem 102/Pjg untuk mengetahui apa kesulitan rakyat sehingga bisa berbuat tepat sasaran yang ujung-ujungnya bersama-sama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Terkait dengan kehidupan masyarakat di wilayah Kalteng, pada umumnya ingin mencari solusi, memecahkan personalan, mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di wilayah tanggung jawab. Untuk normalisasi perekonomian, tidak bisa dilakukan instan tetapi dilakukan secara berkesinambungan," ujarnya.

Danrem mengatakan pula bahwa Program



Kampung Berkah dilakukan secara berjenjang, mulai dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang, yang di dalamnya ada pertanian, peternakan, perikanan, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan spesifik di daerah masing-masing.

Sementara itu, Pj. Sekda Kalteng Nuryakin menyambut baik Program Kampung Berkah yang diinisiasi oleh Korem 102/Pjg. "Inovasi, kreativitas yang dilakukan oleh Korem 102/Pjg ini seiring sejalan dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, yaitu Kalteng Makin Berkah, dan program ini tentunya diharapkan akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kalteng," pungkas Pj. Sekda Nuryakin.

Pj. Sekda Nuryakin berpesan, sekalipun saat ini bencana Covid-19 masih melanda di Kalteng, jangan sampai mengecilkan semangat agar program ini terlaksana dengan baik dengan sinergi dari semua stakeholder. (din/eka).

PJ. SEKDA KALTENG HADIRI PERINGATAN HAKORDIA KEMENKEU TAHUN 2021 SECARA VIRTUAL

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Nuryakin menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Kementerian Keuangan (Hakordia Kemenkeu) Tahun 2021 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah 2, Lantai II Kantor Gubernur, Rabu (8/12/2021). Selain Kepala Daerah atau yang mewakili, acara ini juga dihadiri secara virtual oleh pimpinan Kementerian dan Lembaga.

Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap tanggal 9 Desember dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait budaya antikorupsi. Pada peringatan Hakordia tahun

ini, Kementerian Keuangan mengusung tema "Perkuat Budaya Antikorupsi, Wujudkan Kemenkeu Satu yang Terpercaya, Menuju Indonesia Tangguh dan Tumbuh". Sedangkan tema besar yang diusung secara nasional pada peringatan kali ini adalah "Satu Padu Bangun Budaya Antikorupsi".

Bertindak selaku keynote speaker, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa korupsi adalah penyakit yang sangat berbahaya. "Korupsi akan menurunkan kinerja ekonomi dan kinerja sistem demokrasi atau representasi," jelas Menteri Keuangan.

Selain dapat menggerus fondasi kehidupan

bermasyarakat dan bernegera, korupsi dapat menggerus tingkat kepercayaan kepada pemerintah. "Masyarakat tidak lagi bisa mempercayai pemerintah yang dianggap sangat korup, sehingga akan terjadi gejolak politik sosial, menciptakan kesenjangan luar biasa, menciptakan kerusakan dalam kehidupan sosial ekonomi," ujarnya.

"Jadi, korupsi adalah suatu musuh bersama. Dia tidak mengenal lokasi, dia tidak mengenal kedudukan, dia tidak mengenal profesi, semuanya bisa dihinggapi apa yang disebut penyakit korupsi ini. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa korupsi itu hanya untuk pejabat atau kelompok institusi tertentu," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Skor Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption

Perception Index (CPI) Indonesia sendiri terus membaik dari tahun ke tahun. Tahun 2019 adalah pencapaian tertinggi dalam perolehan skor CPI Indonesia sepanjang 25 tahun terakhir. Namun, CPI Indonesia tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019.

Selain Menteri Keuangan, materi dan arahan juga disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri, Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh. Sementara sebelumnya, laporan kegiatan disampaikan Inspektor Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan Nuh. (ran/yad).

PJ. SEKDA KALTENG BUKA RAPAT KOORDINASI DAN SINERGI PEMBANGUNAN BIDANG AIR MINUM

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Nuryakin membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Air Minum Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) secara virtual melalui konferensi video di Ruang Rapat Bajakah 2, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Senin (29/11/2021).

Rapat virtual ini diikuti oleh para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Pokja PPAS (Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi)/AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)/PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman)/Sanitasi di daerahnya masing-masing. Rapat ini juga diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah dan Instansi terkait di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Rapat ini digelar dalam rangka mengoordinasikan dan menyinergikan pembangunan bidang air minum di wilayah Provinsi Kalteng. "Pertemuan ini diselenggarakan dalam rangka sinergi pembangunan bidang air minum serta persiapan perencanaan tahun 2023," ungkap Pj. Sekda Kalteng Nuryakin dalam sambutannya.

Sesuai RPJMN Tahun 2020-2024, telah ditetapkan target pembangunan bidang perumahan dan permukiman untuk Provinsi Kalteng sampai dengan tahun 2024, yaitu (1) target rumah layak huni 70,98%; (2) target akses sanitasi layak 80%, target sanitasi aman 8%; (3) target BABS di tempat terbuka 0%; (4) target penanganan sampah perkotaan 83%; dan (5) target akses air minum layak 100%, dengan target air minum jaringan perpipaan 26,01% dan bukan jaringan perpipaan 73,99%.

Pj. Sekda pun menegaskan bahwa target

RPJMN 2020-2024 tersebut harus terinternalisasi dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. "Keterpaduan perencanaan, baik secara vertikal maupun horizontal, menjadi kunci yang mengawali perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas," tegas Pj. Sekda Kalteng.

Dalam rangka internalisasi perencanaan pembangunan di daerah tersebut, target Provinsi telah didistribusikan ke dalam target Kabupaten/Kota se-Kalteng. "Target pembangunan bidang perumahan, air minum, dan sanitasi tersebut selanjutnya menjadi arah kebijakan dan strategi serta indikator dalam RPJMD dan RKPD Orovinsi dan Kabupaten/Kota," terang Pj. Sekda Nuryakin.

Di penghujung sambutannya, Pj. Sekda mengatakan bahwa perlu ada komitmen bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk melakukan perencanaan dan penganggaran bidang perumahan, air minum, dan sanitasi secara strategis serta mengoptimalkan infrastruktur pelayanan dasar.

"Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus berkomitmen melakukan optimalisasi infrastruktur pelayanan dasar (sanitasi dan air minum) yang sudah ada, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tepat guna," pungkas Pj. Sekda Nuryakin.

Lebih lanjut, Rapat Koordinasi dan Sinergi Pembangunan Bidang Air Minum kali ini menghadirkan narasumber dari Pusat, antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (set/eka).

WAGUB BUKA SECARA RESMI RAKORDA FKUB KABUPATEN/KOTA SE-KALTENG TAHUN 2021

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten/Kota Se-Kalteng Tahun 2021 secara daring dan luring di Aula Eka Hapakat, Lantai III Kantor Gubernur, Selasa (7/12/2021). Rakorda kali ini mengusung Tema "Penguatan Peran FKUB dalam Memelihara Kerukunan di Kalteng".

Dalam sambutan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang dibacakan oleh Wagub Edy Pratowo disampaikan bahwa Rakorda FKUB Kabupaten/Kota Se-Kalteng Tahun 2021 merupakan implementasi peran dan fungsi FKUB di Kalteng dalam menjaga harmonisasi kerukunan umat beragama, dengan harapan FKUB mampu mengembangkan komunikasi secara terbuka sekaligus mampu mencari solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan, baik yang terjadi saat ini maupun permasalahan yang akan dihadapi.

Sebagaimana diketahui, FKUB khususnya di Kalteng, antara lain menjadi rujukan tentang kerukunan, netralitas dalam penanganan persoalan/konflik masyarakat, mediator dalam perselisihan dan juga sebagai juru bicara untuk kepentingan semua agama, serta bijak dalam tindakan guna menyikapi segala bentuk permasalahan.

Diharapkan, Rakorda FKUB Kabupaten/Kota se-Kalteng ini mampu menghasilkan kesepakatan yang strategis dan aktual guna meningkatkan dan memantapkan peran serta kualitas keberadaan FKUB,

ditambah lagi dengan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Kerukunan umat beragama menjadi kunci terpenting dalam terbentuknya FKUB itu sendiri yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Gubernur Sugianto Sabran mengimbau kepada seluruh peserta agar dalam Rakorda FKUB ini dapat mengungkapkan kekuatan dan kelemahan yang diperoleh ketika melaksanakan program dan kegiatan tahun 2021 sekaligus memberikan solusi serta perbaikan untuk periode berikutnya.

Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Anggota FKUB dan seluruh masyarakat yang telah menciptakan Kerukunan di Kabupaten/Kota se-Kalteng, sehingga sampai saat ini kerukunan umat beragama di Kalteng dalam kondisi kondusif dan harmonis.

Hadir juga dalam kegiatan hari ini, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Ketua FKUB Kalteng H. Bulkani, serta para Anggota FKUB Provinsi Kalteng. Sedangkan hadir secara virtual, Wakil Bupati/Wakil Wali Kota selaku Ketua Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota dan para Anggota FKUB se-Kalteng. (din/bow).



WAGUB EDY PRATOWO HADIRI PELANTIKAN PENGURUS MAJELIS WILAYAH KAHMI KALTENG PERIODE 2021-2026

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo menghadiri acara Pelantikan Pengurus Majelis Wilayah (MW) Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kalimantan Tengah (Kalteng) Periode 2021-2026, bertempat di Ruang Pertemuan M Bahalap Hotel, Kota Palangka Raya pada Selasa (7/12/2021).

Pada kesempatan itu, Presidium Majelis Nasional KAHMI H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung yang juga merupakan Ketua Komisi II DPR RI secara resmi melantik para pengurus MW KAHMI Kalteng 2021-2026, di antaranya H. Abdul Razak sebagai Ketua Umum, Daryana sebagai Sekretaris Umum, dan A. Selanorwanda sebagai Bendahara Umum.

Atas dilaksanakannya pelantikan tersebut, Wagub Edy Pratowo pun menyampaikan ucapan selamat kepada segenap pengurus MW KAHMI Kalteng periode tahun 2021-2026 yang baru saja dilantik. Wagub kemudian meminta kepada para pengurus agar dapat mengemban amanah itu dengan sebaik-baiknya.

“Saya mengucapkan selamat kepada para pengurus Majelis Wilayah KAHMI Provinsi Kalimantan Tengah yang baru saja dilantik, disertai harapan semoga dapat melaksanakan amanat yang diemban dengan sebaik mungkin,” ungkap Wagub Edy Pratowo.

Selanjutnya, Wagub berharap kepengurusan MW KAHMI Kalteng 2021-2026 bisa semakin memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi untuk mendukung kemajuan dan pembangunan demi mewujudkan Kalteng Makin Berkah. Terlebih lagi, sejumlah tokoh penting Kalteng mengisi kepengurusan, salah satunya Ketua Umum MW Kahmi Kalteng H. Abdul Razak yang juga



menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalteng.

“Semoga KAHMI Kalimantan Tengah dapat terus berperan aktif dan turut serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa, sebagai bagian dari upaya menyukkseskan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah,” harap Wagub Edy Pratowo.

Tampak pula hadir dalam acara pelantikan Kepengurusan MW KAHMI Kalteng Periode 2021-2026, antara lain Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Nuryakin, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, dan para pengurus MW KAHMI Kalteng yang kali ini dilantik.

Lebih lanjut, acara pelantikan yang digelar dengan memperhatikan protokol kesehatan tersebut dirangkai pula dengan kegiatan Diskusi Publik, dengan mengusung tema “Kemitraan Strategis Legislatif dan Eksekutif dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. (set/bow).



PEMPROV GELAR KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN REVISI RTRW PROVINSI KALTENG 2015-2035



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng), melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik II Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalteng Tahun 2015-2035.

Kegiatan Konsultasi Publik II Revisi RTRW Kalteng yang dilaksanakan secara luring dan daring tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Leonard S. Ampung yang hadir mewakili Gubernur, bertempat di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya pada Kamis (9/12/2021).

Forum Konsultasi Publik tersebut diselenggarakan dalam rangka mendapatkan berbagai masukan, tanggapan, dan pandangan dari para stakeholders (pemangku kepentingan) terkait penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalteng.

Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Leonard S. Ampung, menyambut baik penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut yang diharapkan bisa menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk mendukung percepatan penyelesaian regulasi revisi RTRW Kalteng.

“Semoga acara Konsultasi Publik II Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 ini dapat

berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekomendasi kebijakan percepatan pemanfaatan ruang,” ungkap Gubernur sebagaimana disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Revisi RTRW ini merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan, sehingga nantinya akan dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalteng.

Oleh karena itu, semua pihak terkait, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, diharapkan bisa turut mengawal proses penyusunan Revisi RTRW Provinsi Kalteng tersebut. “Sehingga setelah RTRWP ini ditetapkan menjadi peraturan daerah, nantinya betul-betul bisa menjadi pedoman dan panglima pembangunan serta tidak akan ada lagi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah,” harap Gubernur melalui Asisten Leonard S. Ampung.

Tampak pula hadir langsung pada acara tersebut, antara lain Kepala Dinas PUPR Shalahuddin, Kepala Bappedalitbang Kaspinor, Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Suhaemi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan A. Syaifudi, dan Plt. Kadisnakertrans Farid Wajdi, serta sejumlah instansi dan pihak terkait. Turut hadir secara virtual, yaitu Anggota DPD RI Dapil Kalteng Agustin Teras Narang. (set/bow).

WAGUB KALTENG BUKA RAKORWIL TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH SEMESTER II TAHUN 2021



PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) H. Edy Pratowo membuka secara resmi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Semester II Tahun 2021 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), bertempat di Aula Jayang Tingang, Kompleks Kantor Gubernur, Kota Palangka Raya pada Senin (13/12/2021) sore.

Menyampaikan sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Wagub Edy Pratowo mengungkapkan bahwa melalui sinergi antar lembaga/instansi, TPAKD Provinsi Kalteng telah mampu mengimplementasikan dengan baik berbagai kegiatan akses keuangan yang menjadi program-programnya. "Meskipun pandemi COVID-19 menjadi tantangan, TPAKD cukup berhasil dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan," ungkapnya.

Wagub Edy Pratowo kemudian menyatakan kondisi pandemi menjadi salah satu tantangan terbesar yang menyadarkan semua pihak bahwa ketersediaan produk/layanan keuangan yang mudah dijangkau di seluruh daerah perlu diperhatikan mengingat kegiatan perekonomian hendaknya masih tetap bisa berjalan, meski dalam keterbatasan. "Di sinilah perlunya optimalisasi peran TPAKD," terang Wagub.

Oleh karena itu, Wagub Edy Pratowo menyampaikan apresiasi Gubernur kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah membentuk TPAKD dan sekaligus meminta Pemerintah Kabupaten yang belum agar segera membentuk TPAKD, sehingga menjadi garda terdepan dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk/

layanan keuangan yang diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemuliharaan ekonomi.

"Saya mengapresiasi kepada seluruh Kabupaten/Kota yang telah membentuk TPAKD dan menjalankan program sesuai rencana dan saya juga mengimbau kepada seluruh Kabupaten yang belum membentuk untuk segera melakukan pembentukan TPAKD," tutur Wagub Edy Pratowo.

Untuk diketahui, hingga saat ini, di wilayah Provinsi Kalteng, sudah terbentuk sebanyak 1 TPAKD Provinsi dan 8 TPAKD Kabupaten/Kota, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Kapuas, Sukamara, Seruyan, dan Gunung Mas.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng Otto Fitriandy dalam sambutannya juga mengemukakan harapan yang sama agar seluruh Pemerintah Kabupaten dapat segera membentuk TPAKD di seluruh daerah masing-masing. "Ini tentunya untuk mendorong percepatan akses keuangan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," jelas Kepala OJK Kalteng.

"Bukti empiris menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan, khususnya akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, dapat mendorong penurunan tingkat kemiskinan dan mempersempit jurang ketimpangan," imbuh Kepala OJK Kalteng Otto Fitriandy.

Kepala OJK Otto Fitriandy selanjutnya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dukungan Gubernur Kalteng terhadap percepatan pembentukan TPAKD. "Yang sudah sangat mendukung percepatan pembentukan TPAKD di tingkat Kabupaten, dengan menerbitkan surat kepada seluruh Bupati yang belum membentuk TPAKD untuk dapat segera membentuk dan mengukuhkan tim tersebut," pungkasnya.

Tampak pula hadir langsung pada Rakorwil tersebut, di antaranya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kaspinor, Plt. Kepala Biro Perekonomian Said Salim, serta beberapa Kepala Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya yang tergabung dalam keanggotaan TPAKD Provinsi Kalteng.

Lebih lanjut, Rakorwil TPAKD se-Kalteng kali ini juga diikuti secara virtual melalui konferensi video oleh Deputi Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan OJK Pusat Rose Dian Sundari, para Bupati/Wali Kota, dan jajaran Perangkat Daerah terkait, para pengurus TPAKD Kabupaten/Kota, serta Direksi dan Pemimpin Cabang Lembaga Jasa Keuangan dan Perbankan. (set/bow)

WAGUB IKUTI RAKOR KESIAPAN PENERAPAN PPKM NATARU BERSAMA MENDAGRI

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo, dengan didampingi Kepala Dinas Kesehatan Suyuti Syamsul, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penerapan PPKM Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) serta Percepatan Vaksinasi, Rabu (08/12/2021) secara virtual melalui konferensi video dari Ruang Rapat Wakil Gubernur, Lantai I Kantor Gubernur.

Rapat yang membahas mengenai langkah-langkah untuk menghadapi agar Nataru tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19 ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh sejumlah Kementerian/Lembaga, Pimpinan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Indonesia, serta TNI/Polri

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa belajar dari pengalaman sebelumnya, libur Nataru menjadi salah satu penyebab lonjakan kasus Covid-19 pada bulan Januari tahun 2021. "Maka dari itu, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi karena ada kerumunan massa yang berpotensi penularan," katanya.

Dibeberkan oleh Mendagri, pada hari Senin (6/12/2021) lalu telah dilaksanakan Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, hadir juga Wapres, sejumlah menteri, Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan lain-lain membahas terkait libur Nataru.

"Hasil rapat terbatas tersebut yang utama adalah kita tidak menggunakan istilah Level 3 karena tidak semua daerah itu sama tingkat kerawanan penularannya, sehingga Bapak Presiden memberikan arahan kita tidak menerapkan Level 3, tapi membuat aturan spesifik mengenai antisipasi atau penanggulangan Covid-19 di masa Nataru, yaitu pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Pada tanggal itulah akan dilakukan pembatasan secara spesifik. Pembatasan spesifik ini sifatnya mengadopsi pembatasan substansi yang diatur dalam sistem Level 3," ujar Mendagri.

Kepada para Kepala Daerah diinstruksikan untuk mengaktifkan kembali Satgas Covid-19 di masing-masing lingkungan, mulai dari tingkat Provinsi hingga RT/RW.

Kemudian, menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment). Selain itu, juga melakukan koordinasi dengan Forkopimda dan pemangku kepentingan lainnya yang dianggap perlu dalam rangka pencegahan dan penegakan disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Selain itu, lakukan juga sosialisasi peniadaan mudik Nataru kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya; mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bepergian, tidak pulang kampung jika tidak mendesak; memperbanyak penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik; dan pengaturan arus pelaku perjalanan masuk dari luar negeri termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai antisipasi tradisi mudik Nataru," ungkap Mendagri Tito Karnavian.

Selanjutnya, Mendagri menyampaikan terkait dengan target Presiden Joko Widodo, yaitu vaksinasi masyarakat Indonesia 70% hingga akhir tahun 2021. Oleh sebab itu, menurut Mendagri, perlu dilakukan beberapa hal, yakni percepatan vaksinasi dosis 2 terutama yang terlambat, percepatan vaksinasi Lansia agar melampaui target dosis 1 60%, percepatan vaksinasi Provinsi agar melampaui target dosis 1 70%, percepatan dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis platform vaksin, serta Forkopimda berperan kunci dalam koordinasi percepatan vaksinasi.

Disampaikan pula, Pemimpin Daerah diharapkan berperan untuk memastikan strategi vaksinasi tepat sasaran. Pemimpin Daerah dan Forkopimda diharapkan untuk berkoordinasi dengan semua stakeholder untuk memastikan alokasi vaksin dari Pusat dapat digunakan dengan cepat sesuai target sasaran, termasuk melakukan realokasi ke Kabupaten/Kota lainnya bila diperlukan. Lalu, mengkoordinasikan dukungan TNI/Polri, institusi lain, dan swasta dalam bentuk SDM Nakes dan non Nakes, logistik kegiatan, serta penggalangan masyarakat. (win/renn).



WHO TETAPKAN VARIAN BARU B.1.1.529 MENJADI VARIAN YANG MENGKHAWATIRKAN

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menyampaikan Press Release mengenai perkembangan penanganan pandemi Covid-19 sampai dengan hari Selasa (30/11/2021) pukul 15.00 WIB.

Dalam keterangan rilisnya kali ini, Satgas Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) resmi memasukkan varian baru B.1.1.529 atau varian Omicron menjadi varian yang mengkhawatirkan atau variant of concern (VOC). Status VOC menandakan varian tersebut memiliki tingkat penularan tinggi, virulensi yang tinggi, serta menurunkan efektivitas diagnosis, pengobatan, dan kerja vaksin yang ada. Sebelumnya, WHO telah memasukkan varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta dalam status VOC tersebut. Kehadiran varian baru Omicron mengingatkan bahwa pandemi belum usai. "Untuk itu, penting bagi kita tetap melakukan hal-hal yang dapat mengurangi penyebaran virus Covid-19," Tim Satgas mengingatkan.

WHO menyebutkan langkah-langkah paling efektif yang dapat dilakukan, antara lain dengan menjaga jarak fisik minimal 1 meter dengan orang lain, juga dengan memakai masker dengan benar, lalu membuka jendela untuk meningkatkan ventilasi.

Kemudian, menghindari ruangan dengan ventilasi buruk atau ramai dan tidak lupa untuk rutin mencuci tangan memakai sabun dengan benar. Jika batuk/bersin, ditutup dengan menggunakan lipatan siku atau tisu. Selain itu, yang penting juga adalah segera vaksinasi jikagiliran tiba.

Tim Satgas Penanganan Covid-19 juga menyampaikan imbauan agar selain dilakukan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan hidup menjadi tuntutan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Masih ada sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

Perilaku sehat 5M menjadi upaya pencegahan yang sangat penting. Strategi pencegahan Covid-19 oleh Tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kalteng Bidang Perubahan Perilaku difokuskan pada peningkatan kepatuhan 5M. Setiap orang harus mau

dan mampu melakukan perubahan perilaku kepatuhan 5M, sehingga dapat mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Selanjutnya, disampaikan perkembangan data Covid-19 Kalteng pada hari ini, di mana terdapat penambahan Kasus Konfirmasi sebanyak 1 orang di Sukamara, sehingga dari semula sebanyak 46.669 orang menjadi 46.670 orang. Pasien Sembuh ada penambahan sebanyak 4 orang, yaitu di Palangka Raya 2 orang, Barito Utara 1 orang, dan Murung Raya 1 orang, total menjadi 45.072 orang.

Pasien Dalam Perawatan ada penurunan sebanyak 3 orang, sehingga dari semula 15 orang menjadi 12 orang. Kasus Meninggal tidak ada penambahan, tetap 1.586 orang, dengan tingkat kematian (CFR) 3,4%.

Untuk Keterpakaian Tempat Tidur pada RS (BOR), Tempat Tidur Intensif mengalami penurunan Tempat Tidur Terpakai (9,52%), sehingga dari 21,43% menjadi 11,90%, di mana tidak ada Kabupaten/Kota yang BOR di atas 50%, sementara Tempat Tidur Isolasi mengalami peningkatan Tempat Tidur Terpakai (0,40%), sehingga dari 2,06% menjadi 2,46%, di mana tidak ada Kabupaten/Kota yang BOR di atas 50%.

Untuk capaian target vaksinasi sebesar 2.036.104, realisasi Vaksinasi Tahap I sebanyak 1.285.476 atau sebesar 63,13% dan Tahap II sebanyak 758.592 atau sebesar 37,26%.

Untuk capaian vaksinasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, SMA, serta SMK Sederajat, realisasi Vaksinasi PNS/GTT/PTT sebanyak 6.258 atau sebesar 79,01%, Dosis I SMA/SMK sebanyak 73.202 atau sebesar 76,95%, dan Dosis II SMA/SMK sebanyak 32.403 atau sebesar 34,06%. (win)



4 UPAYA PEMERINTAH CEGAH LONJAKAN COVID-19 JELANG NATARU

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (09/12/2021) menyampaikan bahwa menjelang perayaan hari Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), mobilitas masyarakat semakin meningkat.

Untuk mengatasi hal demikian, pemerintah berupaya untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus atau ancaman gelombang ketiga Covid-19 saat libur Natal dan Tahun Baru, di antaranya: Pertama, deteksi melalui penguatan testing, tracing, dan karantina atau isolasi. Deteksi juga dilakukan melalui surveilans untuk Pembelajaran Tatap Muka (PTM) serta surveilans genomic untuk mengawasi varian baru dan pengawasan di pintu masuk negara.

Kedua, manajemen klinis yang dilakukan tata laksana kasus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan termasuk potensi obat baru dan persiapan kapasitas rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Ketiga, perubahan perilaku yang dilakukan melalui penguatan protokol kesehatan berbasis teknologi informasi Peduli Lindungi serta peningkatan cakupan vaksinasi nasional.

Keempat, dilakukan penguatan sistem kesehatan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dan memenuhi standar protokol kesehatan.

“Pandemi Covid-19 sudah mulai membaik, maka harus kita pertahankan dan pastikan setelah libur Natal dan Tahun Baru tidak terjadi lonjakan kasus. Yang terpenting dilakukan adalah menekan laju kasus dengan cara memastikan mobilitas tidak meningkat secara tajam agar laju penularan juga tidak meningkat, semakin disiplin terapkan protokol kesehatan, dan terus meningkatkan cakupan vaksinasi,” ujar Tim Satgas.

Upaya yang dilakukan pemerintah akan efektif jika ada kerja sama yang baik dengan masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau agar selain dilakukan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan sebagai kebiasaan hidup menjadi tuntutan dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Sebagian masyarakat telah patuh protokol kesehatan, namun masih saja ada sebagian lainnya yang kurang memiliki kesadaran untuk menerapkan prinsip 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan.

Jumlah akumulasi data sampai dengan hari ini, Kamis (09/12/2021), yaitu pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kalteng ada penambahan sebanyak 1 orang, sehingga menjadi 46.685 orang. Pasien



dinyatakan sembuh ada penambahan 2 orang, sehingga total menjadi 45.090 orang. Dan, pasien dinyatakan meninggal dunia tidak ada penambahan, sehingga tetap 1.586 orang.

Selanjutnya, perkembangan data Covid-19 yang telah dihimpun akumulasinya pada 09 Desember 2021 pukul 15.00 WIB, sebagai berikut: Kasus Konfirmasi ada penambahan sebanyak 1 orang, yaitu di Barito Utara, sehingga dari semula sebanyak 46.684 orang menjadi 46.685 orang. Sembuh ada penambahan sebanyak 2 orang, yaitu di Sukamara 1 orang dan Kapuas 1 orang, sehingga dari semula 45.088 orang menjadi 45.090 orang. Dalam Perawatan ada penurunan sebanyak 1 orang, sehingga dari semula 10 orang menjadi 9 orang. Kasus Meninggal tidak ada penambahan, sehingga tetap 1.586 orang, dengan ringkat kematian (CFR) 3,4%.

Untuk Keterpakaian Tempat Tidur pada RS (BOR), Tempat Tidur Intensif mengalami penurunan Tempat Tidur Terpakai (9,52%), sehingga dari 23,81% menjadi 14,29%, di mana tidak ada Kabupaten/Kota yang BOR di atas 50%, sementara Tempat Tidur Isolasi tidak mengalami perubahan Tempat Tidur Terpakai (0,00%), sehingga tetap 2,38%, di mana tidak ada Kabupaten/Kota yang BOR di atas 50%.

Untuk capaian Target Vaksinasi Tahap I dan II sebesar 2.036.104, realisasi Vaksinasi Tahap I sebanyak 1.348.114 atau sebesar 66,21% dan Tahap II sebanyak 798.516 atau sebesar 39,22%, sementara untuk capaian target Vaksinasi Tahap III bagi Tenaga Kesehatan sebesar 24.200, realisasi sebanyak 18.789 atau sebesar 77,64%. Untuk capaian target vaksinasi bagi Guru dan Tenaga Kependidikan, SMA, serta SMK Sederajat, realisasi Vaksinasi PNS/GTT/PTT tidak ada penambahan sehingga tetap sebanyak 6.258 atau sebesar 79,01%, Dosis I SMA/SMK tidak ada penambahan sehingga tetap sebanyak 73.202 atau sebesar 76,95%, dan Dosis II SMA/SMK tidak ada penambahan sehingga tetap sebanyak 32.403 atau sebesar 34,06%. (din/nov).

GUBERNUR SUGIANTO SABRAN TINJAU BENDUNGAN KARAU DI BARITO TIMUR

DUSUN TENGAH – BIRO ADPIM. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Sugianto Sabran melakukan kunjungan kerja (Kunker) dalam rangka meninjau Bendungan Karau yang berada di Desa Batu Putih, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur (Bartim) pada Jumat (3/12/2021).

Beberapa Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng turut dalam rombongan Kunker Gubernur tersebut, antara lain Kepala Dinas PUPR Shalahuddin, Kepala Bappedalitbang Kaspinor, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sunarti, Kepala BKD Lisda Arriyana, Plt. Kepala Dinas Perhubungan Yulindra Dedi, dan Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder.

Kedatangan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beserta rombongan tersebut disambut langsung oleh Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas, Wakil Bupati Habib Said Abdul Saleh, Forkopimda setempat, dan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur yang terkait. Rombongan Gubernur kemudian langsung melakukan peninjauan ke Bendungan Karau.

Dalam sesi wawancara usai kegiatan peninjauan, Gubernur Sugianto Sabran menjelaskan bahwa kunjungan kerjanya tersebut adalah dalam rangka melihat potensi pertanian Kabupaten Barito Timur yang begitu besar, terutama karena ditunjang dengan keberadaan Bendungan Karau.

“Tadi, yang dikunjungi, sudah pasti kita melihat potensi pertanian yang sangat luar biasa di Bartim, karena kenapa, adanya Bendungan Karau, yang mana ini kepunyaan Kementerian PUPR. Yang mana, bendungan ini bisa menghasilkan pertanian, yang biasa dulu, mungkin petani sini dulu, yang mana masih menghasilkan IP (Indeks Pertanian) 100, 1 kali tanam saja, terus sekarang bisa IP200 sampai bahkan ada yang IP300,” ungkap Gubernur.

Untuk itu, Gubernur Kalteng pun berharap Kabupaten Barito Timur nantinya mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat, khususnya pengembangan Bendungan Karau, agar bisa mengaliri lahan yang lebih



luas lagi, yang tentunya akan semakin meningkatkan produktivitas potensi pertanian kabupaten ini.

“Mudah-mudahan ini nantinya, ini nantinya dapat perhatian dari Pemerintah Pusat, Bartim ini bisa dibantu dengan dana DAK, apakah dana DAK dari Kementerian PUPR, nanti kita bicarakan, kita usulkan bahwa bendungan ini bisa ditambah lagi luasannya,” harap Gubernur Sugianto Sabran.

Gubernur Sugianto Sabran pun menerangkan bahwa pengembangan potensi pertanian Barito Timur ini sangat penting dilakukan, terlebih lagi dengan adanya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur.

“Mudah-mudahan Bartim ada mengambil bagian, karena Bartim itu mendekati IKN,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran.

Selanjutnya, Gubernur Kalteng juga mengemukakan bahwa hasil kunjungan kerja kali ini nantinya menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di tahun 2023. Gubernur pun menekankan pentingnya sinergitas dan kerja sama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Pembangunan Kalteng Makin Berkah.

“Semuanya itu, kan, dampaknya bagaimana masyarakat Kalteng itu, Kalteng ini bisa membangun dan bermartabat, dan akhirnya masyarakatnya sejahtera. Sejahtera itu kuncinya, Kalteng itu bermartabat, sehingga masyarakatnya sejahtera. Itulah arti daripada penjabaran BERKAH itu,” pungkas Gubernur.

Lebih lanjut, selesai peninjauan di Bendungan Karau Kabupaten Barito Timur tersebut, Gubernur Sugianto Sabran beserta rombongan kemudian melanjutkan rangkaian kunjungan kerja dengan mengunjungi Kabupaten Barito Selatan untuk meninjau potensi di Desa Danau Sadar. (set/man).



WAGUB HADIRI PUNCAK PERINGATAN HARI IBU TINGKAT PROVINSI KALTENG

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) H. Edy Pratowo, bersama Ketua TP-PKK Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran, menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Kalteng Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (9/12/2021).

Wagub Kalteng saat membacakan sambutan tertulis Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati Puspayoga mengatakan bahwa Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember merupakan bentuk pengakuan serta penghargaan dan perjuangan perempuan Indonesia dari masa ke masa. Tanggal ini dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada Kongres Perempuan I di Yogyakarta pada tahun 1928 yang mana merupakan awal kebangkitan gerakan perempuan Indonesia. Oleh karena itu, peringatan Hari Ibu Indonesia bukan Mothers Day, melainkan momentum untuk mendorong perempuan Indonesia menjadi perempuan yang berdaya dan setara kedudukannya.

Pada kesempatan yang sama, Wagub Edy Pratowo juga mengatakan hingga saat ini telah banyak kemajuan yang dirasakan perempuan namun kesetaraan ideal yang dicita-citakan belum sepenuhnya tercapai. Budaya patriarki yang telah mengakar selama berabad-abad masih tersisa dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan masih menghadapi berbagai permasalahan yang mengancam kualitas hidupnya.

Oleh karena itu, melalui peringatan Hari Ibu Ke-93 Tahun 2021, Wagub Kalteng mengajak baik perempuan maupun laki-laki terus mendorong peran perempuan dalam segala bentuk dan sektor pembangunan serta dapat merayakan berbagai kemajuan yang berhasil diraih oleh perempuan sekaligus mengingat bahwa perjuangan masih panjang dan harus terus dilanjutkan.

Hal yang serupa juga disampaikan Ketua TP-PKK Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran yang mengatakan bahwa Peringatan Hari Ibu yang

dirayakan setiap tahun merupakan bentuk penghargaan pada perjuangan perempuan dari masa ke masa yang tidak pernah lepas dari konsepsi kemandirian yang diupayakan untuk memandirikan diri agar tidak bergantung kepada orang lain serta menjadikan perempuan dapat berdaya dan setara kedudukannya. "Para perempuan Indonesia, khususnya di Kalteng, hendaknya selalu berjuang untuk mendapatkan haknya dengan utuh serta harus terus bergerak untuk menjadi manusia dan makhluk sosial yang memiliki hak-hak sosialnya tanpa melupakan peran sebagai seorang ibu dan istri dalam keluarga," ucap Ketua TP-PKK Kalteng.

Ketua TP-PKK Kalteng Yulistra Ivo Sugianto Sabran juga berharap pelaksanaan Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Kalteng tahun ini dapat membawa pengaruh positif bagi peningkatan kualitas hidup serta pemenuhan hak dan kemajuan kaum perempuan, sehingga mereka akan mampu meningkatkan kualitas hidupnya serta mengembangkan segala potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Puncak PHI Tingkat Provinsi Kalteng ditutup dengan pemotongan tumpeng dan pemotongan kue ulang tahun untuk Wakil Gubernur dan Wakapolda Kalteng yang berulang tahun pada 9 Desember.

Puncak Peringatan Hari Ibu Tingkat Provinsi Kalteng tahun ini juga dihadiri oleh Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP-PKK Kalteng Hj. Nunu Andriani Edy Pratowo, Unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, dan Ketua Organisasi Perempuan se-Kalteng, baik secara virtual maupun faktual. (may/eka).





Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri acara Serah Terima Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, bertempat di Aula Jayang Tingang, Lantai II Kantor Gubernur, (2/12/2021).

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo menghadiri sekaligus menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalteng atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2021 pada Pemprov Kalteng dan instansi terkait lainnya, di Ruang VIP lantai II Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalteng, (13/12/2021)



Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo, didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalteng Lisma Arriyana, meninjau pelaksanaan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Tahap II yang digelar di lokasi Tes Uji Kompetensi (TUK) SMAN 3 Palangka Raya, Rabu (8/12/2021).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HAKORDIA

HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

2 0 2 1

SATU PADU BANGUN BUDAYA ANTIKORUPSI

9 Desember 2021



H. SUGIANTO SABRAN
Gubernur Kalimantan Tengah



H. EDY PRATOWO
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah



<http://biroadpim.kalteng.go.id/>



<http://www.facebook.com/SetdaProvKalteng/>



http://www.twitter.com/setda_kalteng



@sekretariat.daerah.kalteng



bulletin.isenmulang@gmail.com